

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI TENGAH KETEGANGAN LAUT CHINA SELATAN : STUDI KASUS KERJASAMA PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA DENGAN JEPANG (2014-2021)

Amri Hakim, Sara Rosmauli

Universitas Abdurrab

Sara.rosmauli0612@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia make decision to conduct defence and security cooperation with Japan amid the tensions in the South china Sea. North Natuna which is an Indonesia area that unilaterally claimed by China as a nine-dash line area, requires Indonesia to take decisions in improving defense and security in the South China Sea. This study aims to explain Indonesia's Maritime Diplomacy in the middle of tensions in the South China Sea : Case Studies of Indonesian Maritime Defense and Security Cooperation with Japan (2014-2021). This study was analyzed using decision-making theory by William D. Coplin and Maritime Diplomacy by Le Miere. This study used a qualitative research approach with explanatory research type and collected secondary data from various published sources. The results of this scientific research answer that there are three main factors behind Indonesia's decision to conduct Defense and Security cooperation with Japan. The first factor is Indonesia's domestic politics, namely the influence of the Indonesian defense ministry. The second factor is Indonesia's economic and military capabilities. The third factor is the international context, namely the anarchic international system, unstable regional conditions and the uncertain dynamics of Indonesia's relations with China. Thus, Indonesia can improve its maritime defense and security by cooperating with Japan.

Keywords : *Decision making theory, Diplomacy Maritime*

A. LATAR BELAKANG

Kawasan Laut *China* Selatan adalah wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Perairan ini memiliki kekayaan alam yang juga merupakan salah satu jalur untuk perdagangan internasional sehingga memiliki peran penting bagi beberapa negara untuk kelangsungan ekonomi, seperti Amerika Serikat, *China*, Jepang dan negara-negara anggota ASEAN yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Konflik Laut *China* Selatan menjadi permasalahan pelik bagi beberapa negara anggota ASEAN. Konflik ini berawal dari klaim *China* atas keseluruhan perairan secara sepihak berdasarkan sejarah kuno mereka yang kemudian dituangkan menjadi *nine-dash line* atau 9 garis putus-putus (Khansa, 2019: 1-2).

Pemerintah Republik Indonesia merespons UU Penjagaan Pantai *China* yang baru, salah satu isi UU tersebut adalah kapal penjaga pantai *China* diizinkan menembak kapal asing yang masuk ke perairan Negeri Tirai Bambu. Kementerian Luar Negeri *China* Wang Wenbin mengatakan Negeri Tirai Bambu berharap "negara-negara terkait konflik Laut *China* Selatan dapat secara objektif dan benar-benar melihat bahwa putusan mengenai UU Penjagaan Pantai *China* yang baru benar adanya dan berharap bahwa mereka tidak akan membuat komentar yang tidak beralasan tentang masalah tersebut". *China* juga mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim apa pun di Laut *China* Selatan, tetapi klaim Beijing atas wilayah yang secara hukum diakui sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna menjadi sumber ketegangan dalam hubungan bilateral antara Jakarta dan Beijing. Menurut Seskoad sebagai Komando Angkatan Darat Indonesia pada bulan Desember 2020, mengatakan *China* sedang bersiap-siap apabila memerlukan serangan yang besar kepada musuh-musuhnya di Laut *China* Selatan. Operasi militer *China* di Kepulauan Natuna sangat dekat karena mereka memiliki niat dan kemampuan militer untuk melakukan serangan besar dari markas mereka di Kepulauan Spratly (CNB Indonesia, 2021). Akibat dari konflik yang terjadi di Laut *China* Selatan banyak negara yang merasa resah akan keamanan laut teritorialnya termasuk Indonesia. Demi terwujudnya Kemandirian pertahanan, Indonesia melakukan beberapa kerjasama pertahanan dengan negara lain salah satunya adalah Jepang. Eskalasi konflik Laut *China* Selatan membuat peneliti tertarik untuk menjelaskan kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia Jepang

[Type text]

ditengah ketegangan Laut *China* Selatan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan. Kondisi geografis suatu negara akan menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Di masa yang akan datang, keberadaan Indonesia akan dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Oleh karena itu, tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan pertahanan yang mumpuni sangat diperlukan (Kemhan, 2019). Posisi strategis Indonesia beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional (Jabarprov, 2017).

Konflik yang terjadi di kawasan Laut *China* Selatan memberikan implikasi politik yang signifikan terhadap Indonesia. Implikasi tersebut dapat membuat Indonesia terjepit dalam pertarungan kepentingan kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat versus *China*. Amerika Serikat dengan orientasi baru kebijakan keamanannya di Asia Pasifik, ingin menancapkan kehadiran yang lebih nyata, masif dan intensif untuk mengimbangi kekuatan *China*. Selain itu, Amerika Serikat dapat dipastikan akan selalu ikut campur dalam konflik Laut *China* Selatan atas nama kepentingan kebebasan bernavigasi bagi angkatan lautnya, khususnya dalam penyebaran kekuatan dari kawasan Asia Pasifik ke kawasan Samudera India dan sebaliknya. Sementara itu, *China* semakin lama semakin berkembang dengan kekuatan militernya. Besarnya jumlah anggaran pertahanan dan alutsista yang dimiliki *China* tidak bisa dikalahkan oleh negara-negara pengklaim lain sekalipun mereka digabungkan. Laut *China* Selatan menjadi flash point di kawasan Asia Pasifik, karena merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi kekayaan minyak bumi dan gas alam yang besar di dunia (Estu Prabowo, 2013).

Konflik Laut *China* Selatan tentunya juga akan berdampak kepada lalu lintas perdagangan Indonesia dengan negara-negara yang bekerjasama dengan

[Type text]

Indonesia. Hal itu akan mengancam kelangsungan perdagangan Indonesia dengan raksasa-raksasa ekonomi di Asia Timur yang berdasarkan statistik, negara-negara itu merupakan salah satu mitra penting ekonomi Indonesia. Kondisi demikian dipastikan akan berpengaruh langsung terhadap ekonomi domestik Indonesia nantinya.

Indonesia dan Jepang merupakan dua negara yang memiliki letak geografis tidak berdekatan, namun memiliki kesamaan negara yaitu negara kepulauan atau maritim. Hubungan Indonesia dan Jepang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka pada Agustus 1945. Indonesia dan Jepang sudah memulai hubungan sejak abad 19 masehi, namun dalam hubungan ini Indonesia bisa dikatakan sebagai aktor pasif dan Jepang lah yang merupakan yang sangat berperan aktif. Motif utama yang dilakukan dalam hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang dalam rentan waktu lebih dari satu abad tersebut adalah ekonomi. Barulah Jepang mempunyai kemajuan yang sangat pesat pada bidang militer dan industri yang kemudian dengan percaya dirinya melakukan ekspansi ke Indonesia pada menjelang akhir paruh pertama abad ke-20 (Ayubi, 2019).

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang dalam bidang pertahanan tersebut tentunya memiliki alasan tertentu. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan atas kepentingan nasional Indonesia yang berdasarkan atas pengamatan dan nilai-nilai strategi, dimana kerjasama yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan memodernisasikan Alutsista yang dimiliki oleh TNI baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta untuk memenuhi kebijakan MEF pemerintah Tahap II periode 2015-2019.

Hubungan kerja sama Indonesia dengan Jepang telah di mulai sejak lama dan berjalan dengan baik, bahkan negara Jepang menjadi salah satu top lima besar negara yang berinvestasi ke Indonesia. Jepang melaksanakan proyek-proyek berskala besar di berbagai sektor di Indonesia terutama dalam sektor ekonomi dan teknologi yang telah memberikan manfaat (Agency, 2018). Ketika masa kepemimpinan Presiden Jokowi hubungan kerja sama dengan Jepang semakin erat. Terbukti dengan adanya undangan dari Jepang, Presiden Jokowi pun menerima atas undangan pertemuan oleh perdan menteri Shinzo Abe pada tanggal 23 Maret 2015, dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan komitmen untuk memperkuat mitra kerja sama strategis dalam bidang kelautan dan demokrasi. Salah

[Type text]

satunya terkait kerja sama di area maritim, kedua pemimpin menegaskan bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian, menstabilkan dan memakmurkan secara regional dan global. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015).

Sebelum tahun 2014 Indonesia-Jepang belum pernah melakukan kerjasama di bidang pertahanan keamanan maritim. Kerjasama pertahanan kedua negara yang telah terjalin sebelum tahun 2014, antara lain adalah kerja sama intelijen, pelatihan teknis, serta pendidikan dan latihan (Kenham, 2008). Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia-Jepang melakukan kerjasama Militer yakni, pendidikan dan latihan (diklat), SDM, industri pertahanan, penanganan terorisme, dan manajemen penanggulangan bencana (Beritasatu.com, 2013). Sehingga, kerjasama pertahanan maritim indonesia-jepang sebelum tahun 2014 belum terjadi, dimana kerjasama pertahanan maritim antara indonesia-jepang di usulkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi sebagai Presiden terpilih ketujuh Indonesia telah menyatakan fokus utama dalam pemerintahannya ialah lebih mengutamakan kepada pembangunan maritim nasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana diplomasi maritim Indonesia di tengah ketegangan laut china selatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui diplomasi maritim Indonesia di tengah ketegangan laut china selatan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana pendekatan penelitian kualitatif menurut Lisa Harrison dan Theresa Callan merupakan pendekatan yang didasarkan pada pendekatan interpretif dan alamiah, serta mencoba untuk memahami mengapa orang melihat tindakan, nilai-nilai (*values*), keyakinan (*beliefs*) dan keputusan, seperti mereka yang melakukannya sendiri. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis eksplanatif. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara dua variabel yaitu faktor pendorong diplomasi maritim Indonesia di tengah ketegangan Laut China Selatan : studi kasus kerjasama pertahanan dan keamanan maritim Indonesia dengan Jepang (2014-2021). Untuk pengumpulan data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan study kepustakaan (*library research*), dengan merujuk pada buku-buku, jurnal dan sumber elektronik dalam bentuk website. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder, yang mana data yang diperoleh dari data-data yang sudah dipublikasikan seperti jurnal, buku ataupun berita.

PEMBAHASAN

Politik dalam negeri merupakan instrumental yang berperan dalam proses pembentukan politik luar negeri negara-negara. Politik domestik membawa dampak besar terhadap politik luar negeri suatu negara. Perbedaan sistem pemerintahan yang dianut seperti demokratis atau authokrasi, terbuka atau tertutup merupakan keadaan dalam negeri yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Kemudian stabilitas negara serta kondisi dalam negeri menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Namun perlu diingat bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat konsideran yang bekerja dalam perumusan politik luar negeri sebuah negara.

Penelitian ini menjelaskan aktor politik dalam negeri Indonesia yang memiliki pengaruh dalam keputusan Indonesia dalam melakukan kerjasama pertahanan dengan Jepang adalah Kementerian pertahanan Indonesia, didalam *policy influencer* dikatakan sebagai *bureaucratic influencer* (birokrat yang mempengaruhi). Dalam Pembentukan arah politik luar negeri Indonesia, Kementerian Pertahanan Indonesia juga ikut serta dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin Indonesia. Salah satu keputusan yang diambil ialah kebijakan dalam melakukan kerjasama bilateral dengan Jepang dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim di tengah ketegangan Laut *China* Selatan.

Pada penelitian ini, menteri pertahanan Indonesia juga terlibat dalam pengembalian keputusan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Dimana Menteri Pertahanan Indonesia Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo berargumen bahwa sikap politik bebas aktif Indonesia yang menjunjung perdamaian menempatkan posisi Indonesia dalam masalah klaim teritorial di kawasan Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai tanpa menggunakan kekerasan untuk menjaga stabilitas sesuai dengan tatanan internasional. Indonesia juga menyatakan posisinya bahwa tidak ikut terlibat dalam Pakta Pertahanan manapun yang terjadi di kawasan Laut China Selatan. Jepang yang merupakan mitra kerjasama Indonesia juga turut menyampaikan pendapat bahwa Jepang sangat menentang upaya secara sepihak mengubah status quo dengan paksa dan kegiatan apapun yang menambah ketegangan.

Kemampuan Ekonomi dan Militer Indonesia

Ekonomi dan militer merupakan kekuatan dalam negeri sebuah negara. Untuk menentukan kekuatan atau kelemahan ekonomi negara tertentu dapat dilihat dari GDP suatu negara. Untuk menentukan kekuatan dan kelemahan militer suatu negara dapat dilihat dari kapasitas penggunaan kekuatan militer dan kestabilan internal suatu negara.

Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia keenam setelah *China*, Jepang, India, Rusia dan Korea Selatan. Laporan dari data Bank Dunia terbaru mengenai perekonomian Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat per 1 Juli ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas. Bank Dunia melaporkan, assessment terkini mencatat GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi USD 3.870. Sedangkan pada Tahun 2019, Indonesia berada di level atas untuk negara berpendapatan menengah atas dengan (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar USD 4.050 per kapita (Merdeka.com, 2021).

Melihat pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan ekonomi, namun akhirnya Indonesia berhasil keluar dari resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07% secara tahunan pada kuartal II-2021 dan tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak Krisis Subprime Mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara *peers*. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat Kasus Aktif Covid-19 rata-rata selama Triwulan II-2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus (SIPRI, 2021).

Grafik 5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber : *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, diakses

dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/05/keluar-dari-resesi-ekonomi-indonesia-tumbuh-707-pada-kuartal-ii-2021>

Melihat perekonomian Indonesia yang baik dan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk anggaran belanja militer, membuat peneliti berargumen bahwa Indonesia serius dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negara dari ancaman.

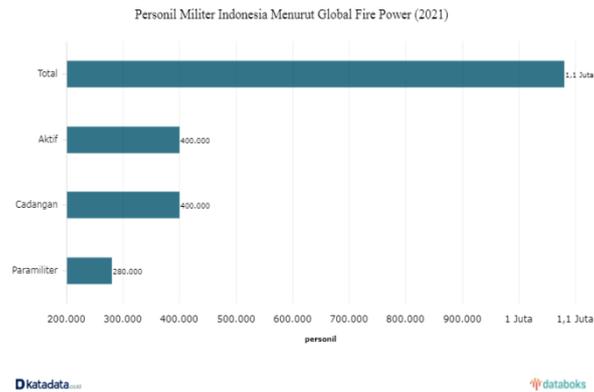
Indonesia merupakan salah satu dari negara yang membangun militer berbasis rakyat yaitu dengan berjuang bersama merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hal inilah yang menjadikan militer Indonesia dikenal sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan sekaligus tentara nasional, jauh sebelum membangun diri sebagai tentara profesional (Kompas.com, 2017).

Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dari 140 negara. Indeks kekuatannya berada di level 0,2684, di bawah Jerman (0,2519) dan di atas Arab Saudi (0,3231). Bahkan lebih tinggi dari pada Australia, Israel, dan Spanyol (Katadata.co.id, 2021). Sedangkan di Asia Tenggara (ASEAN) Indonesia merupakan negara dengan kekuatan terbesar yang memiliki skor 0.2684 untuk bidang kekuatan militer. Dengan demikian, Indonesia berada di posisi puncak di ASEAN, mengalahkan Vietnam dan Thailand yang masing-masing menduduki peringkat ke dua dan tiga. Skor itu dibuat berdasarkan akumulasi semua aspek kekuatan militer yang dikalkulasi menjadi indeks skor.

Menurut data *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)* tahun 2021, Indonesia memiliki jutaan personil militer. *Global FirePower* mencatat bahwa Kekuatan militer Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Dimana Lembaga peringkat militer *Global FirePower* memperkirakan Indonesia memiliki 1,08 personil militer pada 2021 (SIPRI, 2021).

[Type text]

Grafik 6. Personil Militer Indonesia



Sumber : *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/global-firepower-indonesia-miliki-108-juta-personil-militer-pada-2021>

Konteks Internasional

Dalam membahas konteks internasional para analitis realis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional itu bersifat anarki, yang mana tidak adanya kekuatan tertinggi yang bisa menjamin perdamaian dan keamanan internasional itu sendiri. Karena sistem internasional itu bersifat anarki, maka tidak heran jika Indonesia akan melakukan apapun demi menjaga keutuhan keamanan dan memperkuat pertahanan negaranya, termasuk tujuan Indonesia melakukan kerjasama pertahanan maritim dengan Jepang untuk menjaga pertahanan Indonesia.

BENTUK KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-JEPANG DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI TENGAH KETEGANGAN LAUT CHINA SELATAN DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2021

Jokowi sebagai Presiden terpilih ketujuh Indonesia telah menyatakan fokus utama dalam pemerintahannya ialah lebih mengutamakan kepada pembangunan maritim nasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asian Summit* tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Jokowi menegaskan sebuah konsep agenda pembangunan maritim yang terdiri dari 5 pilar, yang salah satu sisanya ada menyatakan tentang kerjasama, yang tepatnya

[Type text]

dalam poin ke-4 yaitu “menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerjasama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan”. Dari poin tersebut telah jelas kerjasama menjadi suatu agenda yang harus diterapkan untuk lebih bisa dengan tepat mewujudkan visi yang telah dicanangkan oleh Jokowi (Ayubi, 2019).

Pada tanggal 30 Maret 2021 Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang YM Yoshihide Suga, di Tokyo, Jepang. Kunjungan kehormatan kepada PM Jepang ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Menhan RI ke Jepang. Dalam lawatan ini, Menhan RI juga melaksanakan pertemuan 2 + 2 yaitu pertemuan bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI – Jepang. Perdana Menteri Suga menyambut baik kunjungan Menteri Luar Negeri Retno dan Menteri Pertahanan Prabowo ke Jepang serta menyampaikan harapan bahwa Perjanjian antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan yang ditandatangani pada hari yang sama, Selasa (30/3), akan menjadi landasan kerja sama keamanan yang lebih dalam antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan kerja sama keamanan dan pertahanan termasuk pengalihan alat dan teknologi pertahanan (Kemhan.go.id, 2021).

Negosiasi Indonesia Untuk Mendapatkan Bantuan Alutsista Jepang.

Indonesia telah mencoba bernegosiasi dengan Jepang untuk mendapatkan bantuan Alutsista. Dalam negosiasi tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan kerja sama keamanan dan pertahanan termasuk pengalihan alat dan teknologi pertahanan.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Jepang 2 + 2 tahun 2021, telah dibahas beberapa topik di bidang pertahanan. Salah satu topik yang dibahas adalah kebijakan negara tentang modernisasi alutsista Indonesia dan pengembangan industri pertahanan nasional. Untuk mendukung misi tersebut, perlu membangun jaringan yang lebih luas dan kerjasama internasional

dengan negara sahabat seperti Jepang. Dalam kegiatan 2+2 ini, Menhan RI juga menandatangani Perjanjian kerjasama Alih Alutsista dan Teknologi yang menandai dimulainya kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dan Jepang (Kemhan, 2021).

Kesepakatan itu kemungkinan akan terealisasi dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi di Tokyo, Selasa 30 maret 2021. Sebelumnya, Perdana Menteri Yoshihide Suga telah mengunjungi Indonesia pada Oktober 2020. Kunjungan tersebut merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai Perdana Menteri. Suga berharap pertemuan itu dapat melahirkan pakta yang menjadi dasar kerja sama keamanan lebih lanjut antara Indonesia dan Jepang.

Pelatihan Kapal Perang Indonesia-Jepang.

Pada tanggal 7 Oktober 2020, Komandan TNI AL mengatakan bahwa Tentara Angkatan Laut (AL) bersama dengan pasukan maritim Jepang menggelar latihan bersama di Laut Natuna Utara di tengah ketegangan kawasan Laut *China* Selatan dan klaim sejarah *China* atas perairan tersebut. Dalam latihan tersebut, TNI AL menerjunkan pasukan dari unsur Gugus Tugas Laut Koarmada I (Guspurla Koarmada I) yang terdiri dari kapal RI (KRI) John Lie-358 dan KRI Susanto-377. Sementara, pasukan beladiri *Japan Maritim Self-Defense Force* (JMSDF) melibatkan kapal penghancur JS Ikazuchi.

Latihan diawali dengan menggelar Rendezvous (RV) di ZEE Indonesia barat daya Pulau Jemaja. Kemudian, keduanya melanjutkan latihan salute and greetings antara Komandan Guspurla Koarmada 1 Laksma TNI Dato Rusman dengan *Commander of Escort Flotilla 2*, Rear Admiral konno Yasushige.

Latihan kemudian berlanjut dengan komunikasi menggunakan isyarat bendera (flaghoist) yang dipimpin oleh KRI John Lie-358 dan latihan RAS *Approach/RASAP*, yakni prosedur manuver dalam pemindahan logistik yang dipimpin helikopter JS Kaga (Kompas.com, 2020).

Pada tanggal 29 Maret 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan [Jepang](#) Nobuo Kishi di Tokyo. Dalam pertemuan itu, kedua pejabat mengecam aktivitas *China* di perairan Laut Natuna Utara yang bisa

meningkatkan ketegangan di kawasan regional.Indonesia-Jepang berharap dapat latihan bersama kembali sesuai dengan perjanjian kerjasama pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Jepang 2 + 2 tahun 2021 yang membahas beberapa topik di bidang pertahanan. Salah satu topik yang dibahas adalah kebijakan negara tentang modernisasi alutsista Indonesia dan pengembangan industri pertahanan nasional. Untuk mendukung misi tersebut, perlu membangun jaringan yang lebih luas dan kerjasama internasional dengan negara sahabat seperti Jepang. Dalam kegiatan 2+2 ini, Menhan RI juga menandatangani Perjanjian kerjasama Alih Alutsista dan Teknologi yang menandai dimulainya kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dan Jepang.

KESIMPULAN

Upaya Indonesia dalam mengambil keputusan diplomasi maritim Indonesia di tengah ketegangan Laut *China* Selatan : studi kasus kerjasama pertahanan dan keamanan maritim Indonesia dengan Jepang (2014-2021) telah didorong oleh faktor politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer, dan juga konteks internasional. Faktor-faktor politik domestik seperti kementerian pertahanan, kemudian didukung dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, yang merupakan faktor-faktor domestik penting yang mendorong Indonesia untuk mengambil keputusan kerjasama pertahanan maritim dengan Jepang.

Kemudian, faktor konteks internasional seperti sistem internasional yang tidak memiliki kekuatan tertinggi dalam menjamin perdamaian keamanan (anarki), dan kondisi kawasan Laut *China* Selatan yang tidak stabil. Yang juga merupakan faktor-faktor yang mendorong Indonesia untuk mengambil keputusan kerjasama pertahanan maritim dengan Jepang.

Kebijakan Indonesia melakukan kerjasama pertahanan maritim dengan Jepang merupakan suatu keputusan yang diambil Indonesia dengan segala pertimbangan faktor-faktor politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional yang akhirnya memutuskan untuk melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan maritim dengan Jepang. Melalui Kerjasama pertahanan maritim Indonesia-Jepang dapat menjaga keamanan dan pertahanan wilayah Laut Natuna Utara dari ancaman serangan yang bisa membahayakan kedaulatan negara Indonesia. Kerjasama pertahanan maritim Indonesia-Jepang merupakan kerja sama keamanan dan pertahanan termasuk pengalihan alat dan teknologi pertahanan serta terwujudnya latihan bersama antar kedua angkatan bersenjata.

Dengan demikian Indonesia juga dapat menyesuaikan kepentingan-kepentingan negaranya baik dibidang keamanan maupun dibidang lainnya, serta memperkuat jalinan hubungan diplomatik yang kuat bersama Jepang.

Saran

Perlu adanya metode penelitian lebih lanjut akan upaya peningkatan keilmuan terutama dalam membahas diplomasi maritim Indonesia ditengah ketegangan Laut *China* Selatan : studi kasus kerjasama pertahanan dan keamanan maritim Indonesia dengan Jepang (2014-2021). Penelitian yang telah disusun dan ditulis peneliti masih

[Type text]

belum kata sempurna dan masih banyak kekurangannya, karena keterbatasan pengetahuan peneliti. Akan tetapi karya penelitian ini murni dari hasil usaha, kerja keras, dan konsisten peneliti untuk dapat menyelesaikannya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan kalangan keilmuan studi hubungan internasional yang tertarik untuk melakukan penelitian dan terkait lainnya tentang diplomasi maritim Indonesia ditengah ketegangan Laut *China* Selatan : studi kasus kerjasama pertahanan dan keamanan maritim Indonesia dengan Jepang (2014-2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, R. N. (2015). *Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Cimahi: Alfabeta
- Arifianto, A. (2019). *Politik Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan Blok Natuna* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Retrieved from <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/08/2.-Politik-Indonesia-Dalam-Konflik-Laut-Cina-Selatan-Blok-Natuna.pdf>
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)
- Benarnews.org. (2020, October 20). Jepang-Indonesia Tingkatkan Kerjasama Militer di Tengah Ketegangan Laut China Selatan. *Benarnews.org*. Retrieved from <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/jepang-indonesia-lcs-10202020174504.html>
- CNBC Indonesia. (2020, Januari 3). RI Kembali Tegaskan Tolak Klaim China Atas Laut Natuna. *CNBC Indonesia*. Retrieved From <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103072615-4-127277/ri-kembali-tegaskan-tolak-klaim-china-atas-laut-natuna/2>
- CNBC Indonesia. (2020, Juli 10). Ini Poin Penting Prabowo Soal Konflik Laut China Selatan.

[Type text]

- CNBC Indonesia. Retrieved From <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710065034-4-171611/ini-poin-penting-prabowo-soal-konflik-laut-china-selatan>
- CNBC Indonesia. 2020, mai 22). AS-China Panas di LCS, Prabowo Minta Selesaikan Secara Damai. CNBC Indonesia. Retrieved From <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200522163050-4-160332/as-china-panas-di-lcs-prabowo-minta-selesaikan-secara-damai>
- CNBC Indonesia.com. (2020, Januari 3). Sikap Menhan Prabowo Kala China Klaim Natuna RI. CNBC Indonesia.com. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103080349-4-127284/sikap-menhan-prabowo-kala-china-klaim-natuna-ri>
- CNBC Indonesia.com. (2021, February 8). RI Khawatir Eskalasi Konflik Laut China Selatan, Ada Apa?. CBNC Indonesia.com. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210208133541-4-221852/ri-khawatir-eskalasi-konflik-laut-china-selatan-ada-apa>
- Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional, Telaah dan Teoritis*. Bandung: Sinar Baru
- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis* (2nd ed.). Bandung: Sinar Baru
- Databoks. (2016, May 12). *Belanja Militer di Indonesia 1988 – 2014*. Databoks. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/belanja-militer-di-indonesia-1988--2014>
- Databoks. (2021, April 27). *Belanja Militer Indonesia Terbesar Ketujuh di Asia*. Databoks. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/27/belanja-militer-indonesia-terbesar-ketujuh-di-asia>
- Detiknews. (2020, September 9). Bertemu Menhan China, Prabowo Sampaikan Sikap Soal Laut China Selatan. Detiknews. Retrieved From <https://news.detik.com/berita/d-5166503/bertemu-menhan-china-prabowo-sampaikan-sikap-soal-laut-china-selatan>
- Dewitt, David. (1994), “Common, Comprehensive and Cooperative Security”. Pacific Affairs. Vol. 7, No. 1, hlm. 1-15.
- Hubunganinternasional. (2020, January 20). Indonesia Sebagai Middle Power - Perlucutan Senjata Nuklir dan Komitmen Politik Luar Negeri. *Hubunganinternasional*. Retrieved from <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/40?title=Indonesia+Sebagai+Middle+>

[Type text]

[Power++Perlucutan+Senjata+Nuklir+dan+Komitmen+Politik+Luar+Negeri](#)

- Jabarprov. (2017, May 4). Bumikan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia. *Jabarprov.* Retrieved from https://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/361/2017/05/04/Bumikan-Visi-Indonesia-Poros-Maritim-Dunia
- Jervis, Robert. (1982). "Security Regimes". *International Organization*, Vol. 36, No. 2, hlm. 357–378.
- Jogjaprov.go.id. (2019, October 30). Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jogjaprov.go.id.* Retrieved from <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8242-menuju-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia>
- Kemenperin.go.id. (2021, Agustus 6). Sektor Manufaktur Tumbuh Agresif di tengah Tekanan Pandemi. *Kemenperin.go.id.* Retrieved From <https://kemenperin.go.id/artikel/22681/Sektor-Manufaktur-Tumbuh-Agresif-di-Tengah-Tekanan-Pandemi->
- Kemhan.go.id. (2019, December 22). Menham RI Lakukan Kunjungan Kehormatan Kepada Menham Jepang. *Kemhan.go.id.* Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/2019/12/22/menhan-ri-lakukan-kunjungan-kehormatan-kepada-menhan-jepang.html>
- Kindyana, T. (2013). *Kebijakan Jepang dalam Mengamankan Kepentingannya terkait Konflik Laut China Selatan* (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"). Retrieved from <http://eprints.upnyk.ac.id/9527/1/TUES%20KINDYANA%20%28151080116%29.pdf>
- Kompas.tv. (2021, March 31). Prabowo Beberkan Isi Kesepakatan Indonesia dan Jepang di Bidang Pertahanan. *Kompas.tv.* Retrieved from <https://www.kompas.tv/article/160030/prabowo-beberkan-isi-kesepakatan-indonesia-dan-jepang-di-bidang-pertahanan>
- Kraska, James. (2011). *Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea*. California: Praeger.
- Krasner, Stephen D. (1983). *International Regimes*. New York: Cornell University Press.
- Le Miere, Cristian. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century*. New York: Routledge.
- [Liputan6.com. \(2020, October 7\). TNI AL Latihan Bersama dengan Pasukan Jepang di Perairan Natuna Utara. *Liputan6.com.* Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/4375841/tni-al-latihan-bersama-dengan-pasukan-jepang-di-perairan-natuna-utara](#)

- Matamatapolitik.com. (2020, June 27). Netral atau Tegas: Mengukur Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan. *Matamatapolitik.com*. Retrieved from <https://www.matamatapolitik.com/netral-atau-tegas-mengukur-kepentingan-indonesia-di-laut-china-selatan-analisis/>
- Merdeka.com. (2021, Juli 7). Laporan Bank Dunia: Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Bawah. *Merdeka.com*. Retrieved From <https://m.merdeka.com/uang/laporan-bank-dunia-indonesia-turun-kelas-jadi-negara-berpenghasilan-menengah-bawah.html>
- Nainggolan, O. R. (2015). *Kepentingan Indonesia Bekerjasama dengan Jepang dalam bidang Pertahanan Tahun 2015* (Universitas Riau). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/205888-kepentingan-indonesia-bekerjasama-dengan.pdf>
- Prabowo, E. (2013). *KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA (Studi Kasus Konflik Laut Cina Selatan)*. Retrieved from <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=368810&val=7132&title=KEBIJAKAN%20DAN%20STRATEGI%20PERTAHANAN%20INDONESIA%20Studi%20Kasus%20Konflik%20Di%20Laut%20Cina%20Selatan>
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rowland, Kevin. (2012) "Decided Proponderance at Sea: Naval Diplomacy in Strategic Thought". *Naval War College Review*, Vol. 65, No. 4, hlm. 89-105.
- Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhamad, S. V. (2013). *Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap kawasan*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Sinaga, L. C. (1919). *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*. -.
- SIPRI. (2019). *SIPRI Military Expenditure Database*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/05/keluar-dari-resesi-ekonomi-indonesia-tumbuh-707-pada-kuartal-ii-2021>
- Snyder, Craig A. (1999). "Regional Security Structures", Snyder, Craig A., *Contemporary Security and Strategy*, London: Deakin University.
- Sukmadewi, P. (2020). *Indo-Pacific Treaty Sebagai Perluasan Kerja Sama Indonesia di Bidang Maritim* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/343684978_INDO-PACIFIC_TREATY_SEBAGAI_PERLUASAN_KERJA_SAMA_INDONESIA_DI_B

IDANG MARITIM

Suproboningrum, L., & Kurniawan, Y. (2017). Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka (Universitas Indonesia). Retrieved from [file:///C:/Users/User/Downloads/1141-2505-1-SM%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/1141-2505-1-SM%20(4).pdf)

Tranding Economics. (2021). *Indonesia – PDB dari Manufaktur*. Retrieved From <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-manufacturing?user=yekaterina>